



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI  
DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS  
TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL  
KABUPATEN – KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA BARAT**

**Oleh :**

**ADRIAN FERNANDES**

**06 953 011**

**Mahasiswa Program Strata Satu ( S-1 ) Jurusan Akuntansi**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG  
2010**



No Alumni Universitas

**ADRIAN FENANDES**

No Alumni Fakultas

**BIODATA**

a). Tempat/Tgl Lahir : Batusangkar/ 07 Desember 1987 b). Nama Orang Tua : Firdaus dan Reni Aswita c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No Bp : 06953011 f). Tanggal Lulus : 20 November 2010 g). Predikat lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,15 i). Lama Studi : 4 tahun 3 bulan j). Alamat Orang Tua : Jl. M. Yamin No 3 Kel. Malana Ponco Kec. Lima Kaum, Kota Batusangkar.

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten – Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat**

Skripsi S-1 Oleh *Adrian Fernandes* Pembimbing : *Firdaus, SE, M.Si, Ak*

**Abstrak**

Penelitian ini mengarahkan untuk memberi keterangan empiris dan menguji dampak Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal dengan menggunakan pooled data. Objek penelitian adalah kabupaten – kabupaten di propinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data dari tahun 2007 – 2009 yang diperoleh dari BPS, situs dirjen perimbangan keuangan pemerintah daerah dan dengan mendatangi kabupaten yang bersangkutan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 56,4 % belanja modal dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, sedangkan 43,6 % sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya.

**Keyword.** APBD, Belanja Modal, Teori Keagenan

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 November 2010, dengan penguji :

<b>Tanda Tangan</b>	1.	2.	3.
<b>Nama Terang</b>	Drs. Edi Hermanto, MBA, Ak	Dr. Suhairi, M.Si, Ak	Dra. Sri Dewi Edmawati, M.Si, Ak

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi :

**DR. Yuskar, SE, MA, Ak**  
NIP. 196009111986031001

\_\_\_\_\_ Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas / Universitas Andalas	
No Alumni Fakultas	Nama	Tanda tangan
No Alumni Universitas	Nama	Tanda tangan



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi menjadi UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim, 2001; Halim & Abdullah, 2006). Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran.

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas &

Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* yang mana pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan *output* pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key 1940 dalam Fozzard, 2001). Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam *public expenditure management*



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh faktor-faktor fundamental yaitu pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDRB), pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal dalam APBD. Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan persamaan regresi linear berganda (*ordinary least square*) dan menggunakan data panel.

Pada pengujian asumsi klasik diketahui bahwa data telah terdistribusi secara normal, bebas dari multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi. Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dengan hasil nilai signifikansi sebesar 0,013 berada di bawah 0,05 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja modal. Pengujian secara parsial variabel independen yang digunakan dalam model menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB), pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2004. *Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Pendekatan principal-agent theory*. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu, 4-5 Oktober 2004.
- Andvig, Jens Chr., Odd-Helge Fjeldstad, Inge Amundsen, Tone Sissener & Tina Søreide. 2001. *Corruption: A review of contemporary research*. Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights Report R 2001: 7. Web: <http://www.cmi.no>.
- Brodjonegoro, Bambang dan Nurkholis, 2003. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Antar Daerah: Analisa Model IRIO, Indonesia, *Journal of Economic and Development*, Vol 3 No.2. Jan 2003, KANOPI (Kajian Ekonomi dan Pembangunan Indonesia) Universitas Indonesia.
- Dobell, Peter & Martin Ulrich. 2002. *Parliament's performance in the budget process: A case study*. Policy Matters 3(2): 1-24. <http://www.irpp.org>.
- Dougherty M.J., K.A. Klase & S.G. Song.2000. The Relationship Between Public Finance Issue, Financial Management Issue, And Conditions of Fiscal Stress in Small and Rural Government : The Case of West Virginia. *Journal of Public Budgeting, Accounting, and Financial Management*. Vol. 12. Number 4. Winter. 545-565.
- Eisenhardt, Kathleen M. 1989. *Agency theory: An assessment and review*. Academy of Management Review 14(1): 57-74.
- Fozzard, Adrian. 2001. The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). *Working paper* 147.
- Freeman, Robert J. & Craig D. Shoulders. 2003. *Governmental and Nonprofit Accounting—Theory and Practice*. Seventh edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi III, 1-52, 79-134, 251-258, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.